

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Pendahuluan

Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, tidak membuat tingkat ketergantungan daerah terhadap pusat menjadi rendah. Salah satu penyebab kondisi ini menurut ketua BPK adalah ketidakmampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Indikasinya, terlihat dari besaran Dana Perimbangan (transfer) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang rata-rata per tahunnya selama satu dekade lebih, mencapai 25 persen lebih dari total belanja APBN. Dimana lebih dari 90 persen pemerintah daerah, menggantungkan 50 persen lebih pembiayaannya dari Dana Perimbangan yang diterima. (*Antara Sumbar.com, 2014*).

Disisi lain, Kementerian Dalam Negeri memperlihatkan realisasi rata-rata belanja APBD yang rendah (Sunarsip, 2016). Bertolak belakang dengan tujuan otonomi daerah sebagaimana tercantum pada undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 2 ayat 3 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

Salah satu penyebab rendahnya kontribusi PAD terhadap APBD yang selama ini terjadi, disebabkan kurang tergalinya potensi pajak yang ada di daerah maupun potensi retribusi daerah. Dan parameter yang digunakan untuk mengukur penggalian potensi pajak daerah pada umumnya menggunakan *tax ratio*, yaitu

perbandingan antara penerimaan pajak dengan PDRB suatu daerah. (*Listiyarko Wijito*).

Rasio pajak sendiri digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayarkan pajak, mengukur kinerja perpajakan, dan melihat potensi pajak yang dimiliki. Adapun PDRB sangat erat kaitannya dengan pajak daerah, karena PDRB menggambarkan jumlah pendapatan potensial yang dapat dikenakan pajak serta kegiatan ekonomi masyarakat, yang jika berkembang dengan baik merupakan potensi yang baik bagi pengenaan pajak di wilayah tersebut. Sehingga semakin tinggi *tax ratio* suatu daerah menggambarkan semakin tinggi kapasitas fiskal atau kemandirian suatu daerah. Selanjutnya, semakin mandiri suatu daerah berarti semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak yang nantinya akan meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) wilayah tersebut.

Prakteknya terlihat dari kajian Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan 2014, yang menyatakan bahwa rata-rata rasio pajak daerah yang bisa dipungut oleh pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia sebesar 0,53% dari PDRB non migas, meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 0,37%. Angka ini menunjukkan bahwa upaya perluasan objek pajak dan pengalihan beberapa jenis pajak ke daerah yang diatur dalam UU 28 Tahun 2009 telah memberikan efek positif kepada pungutan pajak daerah. Akan tetapi, jika dilihat dari rasio pajak pemerintah per wilayah terlihat masih bervariasi untuk Sumatera sebesar 1,3. Variasi ketimpangan ini memberikan indikasi masih rendahnya pemerataan kemampuan daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak pada seluruh Kabupaten/Kota setiap Provinsi di Indonesia.

Ketidakmerataan yang menyebabkan ketimpangan ini merupakan masalah yang harus dicarikan penyelesaiannya, sebab ketimpangan penerimaan pajak yang terus menerus yaitu akan menimbulkan jurang (*gap*) antar wilayah yang nantinya akan membuat daerah maju semakin maju dan daerah terbelakang tetap tertinggal. Sehingga jika hal ini terus berkelanjutan, tingkat ketergantungan daerah terhadap dana perimbangan akan terus meningkat.

Penelitian mengenai disparitas (ketimpangan) pernah dilakukan oleh Wawan Budiarto yang melakukan Analisa Disparitas Pendapatan dengan Menggunakan Koefisien Gini Dan Indeks Williamson di Jawa Barat tahun 2010. Hasilnya diperoleh Koefisien Gini 26.04% dan Indeks Wiliamson 55.20%, sehingga disparitas pendapatan antar kab/kota di Jawa Barat menurut Koefisien Gini adalah rendah, sedangkan menurut Indeks Wiliamson tinggi dan disimpulkan nilai Indeks Wiliamson lebih peka dibanding nilai Koefisien Gini

Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Hermawan (2007), dengan judul penelitian *Analisis Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pemerataan Kemampuan Keuangan dan Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten*. Hasil analisisnya menunjukkan bahwa pengalokasian DAU belum sepenuhnya menunjukkan peranan DAU sebagai mediasi pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Adapun peranan DAU di wilayah Banten selama tahun 2001-2005 adalah (a) meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah tercermin pada nilai Indeks Williamson dari 0,45 tahun 2000 (pra desentralisasi fiskal) menjadi berkisar 0,23 – 0,33 pada tahun 2001-2005 (masa desentralisasi fiskal), (b) berdasarkan hasil estimasi panel data, DAU belum mampu

mendukung perkembangan perekonomian daerah dan memperburuk distribusi pendapatan.

Penelitian ini sendiri, bermaksud melanjutkan penelitian Tilawatil Ciseta Yoda yang berjudul Analisis Pemerataan Kemampuan Penerimaan Pajak Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dengan Hasil penelitian menunjukkan *pertama* analisis *tax ratio* antar Kabupaten di Sumbar periode 2010-2014 berada pada rata-rata 0,11% dengan kategori rendah. *Kedua* analisis *tax ratio* antar Kota di Sumbar periode 2010-2014 berada pada rata-rata 0,27% dengan kategori sedang. *Ketiga* analisis *tax ratio* antar Kabupaten dan Kota di Sumbar periode 2010-2014 berada pada rata-rata 0,17% dengan kategori rendah. *Keempat* analisis pemerataan kemampuan *tax ratio* antar Kabupaten dengan Indeks Williamson periode 2010-2014 berkategori timpang. *Kelima* analisis pemerataan kemampuan *tax ratio* antar Kota dengan Indeks Williamson pada tahun 2010 berkategori timpang, pada tahun 2011 dan 2012 mengalami peningkatan menjadi sangat timpang dan pada tahun 2013 dan 2014 kembali berkategori timpang. *Keenam* analisis pemerataan kemampuan *tax ratio* antar Kabupaten dan Kota dengan Indeks Williamson periode 2010-2014 berkategori sangat timpang.

Sejalan dengan pembahasan tersebut, penelitian ini ditujukan untuk mengetahui seberapa besar disparitas penerimaan pajak (*tax ratio*) antar Wilayah dengan mengambil wilayah Sumatera dan Jawa dari periode tahun 2010-2014. Sehingga tesis ini mengambil judul **“Analisis Disparitas dan Keragaman Kemampuan Penerimaan Pajak (Tax Ratio) Kabupaten/Kota di Wilayah Sumatera dan Jawa”**

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana kemandirian keuangan daerah dengan analisis *tax ratio* antar Kabupaten, antar Kota, antar Kabupaten/Kota serta antar Provinsi di wilayah Sumatera dan Jawa pada periode 2010-2014?
- b. Bagaimana Disparitas kemampuan penerimaan pajak (*tax ratio*) antar Kota, antar Kabupaten/Kota dan antar Provinsi di wilayah Sumatera dan Jawa dengan menggunakan *Strandar Deviasi* pada periode 2010-2014?
- c. Bagaimana keragaman Tax Ratio antar Kota, antar Kabupaten/Kota dan antar Provinsi di wilayah Sumatera dan Jawa dengan menggunakan *Analisis Variance (Annova)* pada periode 2010-2014?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pertumbuhan PDRB terhadap penerimaan pajak Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat pada periode 2010-2014. Berdasarkan tujuan umum tersebut, tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

- a. Menganalisis kemandirian keuangan daerah dengan analisis *tax ratio* antar Kabupaten, antar Kota, serta antar Provinsi di wilayah Sumatera dan Jawa pada periode 2010-2014.
- b. Menganalisis disparitas kemampuan penerimaan pajak (*tax ratio*) antar Kabupaten, antar Kota, antar Provinsi di wilayah Sumatera dan Jawa dengan menggunakan *Standar Deviasi* pada periode 2010-2014.

- c. Menganalisis keragaman tax ratio antar Kabupaten, antar Kota, antar Kabupaten/Kota dan antar Provinsi di wilayah Sumatera dan Jawa dengan menggunakan *Analisis Variance (Annova)* pada periode 2010-2014.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil melalui penelitian ini adalah:

- a. Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumbar

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan untuk mengoptimisasi penggalan dan pengembangan potensi daerah di wilayah Sumatera dan Jawa.

- b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran dalam hal menganalisis pemerataan kemampuan penerimaan pajak (*tax ratio*) daerah dalam meningkatkan kinerja keuangan wilayah Sumatera dan Jawa.

- c. Bagi Peneliti yang Relevan

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi, acuan dan perbandingan bagi peneliti selanjutnya.

#### 1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini dituang ke dalam 7 (tujuh) bab yang masing-masing bab dirinci lagi ke dalam beberapa sub bab dengan sistematika sebagai berikut:

**Bab I** adalah bab pendahuluan. Bab ini mencakup uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup dan sistematika pembahasan.

**Bab II** adalah bab tinjauan literatur. Bab ini meliputi uraian tentang konsep perencanaan dan penganggaran, keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran serta hasil-hasil penelitian sebelumnya dan kerangka analisis.

**Bab III** adalah bab metodologi penelitian. Bab ini mencakup lokasi penelitian, sumber data, metode dalam analisa data serta definisi operasional.

**Bab IV** adalah bab gambaran umum wilayah penelitian. Bab ini meliputi kondisi wilayah penelitian, serta gambaran objek penelitian.

**Bab V** adalah bab hasil analisa dan pembahasan. Bab ini meliputi analisis bagaimana Tax Ratio di Kabupaten/Kota serta analisis disparitas serta *Analisis of Variance (Annova)* yang menggambarkan ketimpangan *Tax Ratio* di wilayah Sumatera dan Jawa.

**Bab VI penutup.** Bab ini mencakup kesimpulan yang ditarik dari hasil penelitian dan saran yang dapat dipergunakan sebagai masukan untuk mengatasi permasalahan yang mungkin timbul dalam mengatasi Ketimpangan *Tax Ratio* di wilayah Sumatera dan Jawa.